

**PENGUATAN PERAN ADVOKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN ANAK BAGI
KOMITE PENDIDIKAN MASYARAKAT
KELURAHAN KEBON JAYANTI KECAMATAN KIARA CONDONG
KOTA BANDUNG**

Hendrianto

Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Sumatera Barat
henstks@gmail.com

Abstract

The emergence of various social problems of children, such as street children, child trafficking, until the child exploitation and sexual economy, mostly due to non-fulfillment of basic rights and needs of children, one of them is the right to education. This research aims to develop a model of prevention and intervention of school drop-outs in the Kelurahan Kebon Jayanti. The research method used a qualitative research method with participatory action research. The results showed that the application of the early models still need to be developed, particularly in strengthening the internal base (knowledge and skills) and external basis (strengthen relations and external support). Identification results in the need for strengthening the role of advocacy and information KPM for child education, demonstrates the need for improved understanding of the role of caretaker and child education advocacy advocacy action. An reflection of the implementation of the activities showed an increase in the understanding of the role of advocacy KPM board and be able to realize the role well, as did the lobby to the foundation IABRI, socialization activities and campaigns, cooperation with mass media and parliament hearing with the city of Bandung.

Keywords: strengthening the role, advocacy and information, community education committee

Abstrak

Munculnya berbagai permasalahan sosial anak, seperti anak jalanan, perdagangan (*trafficking*) anak, hingga eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual, banyak disebabkan karena tidak terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar anak, salah satunya hak untuk memperoleh pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pencegahan dan penanganan anak putus sekolah di Kelurahan Kebon Jayanti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian tindakan partisipatif (*participatory action research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model awal masih perlu dikembangkan, terutama dalam memperkuat basis internal (pengetahuan dan keterampilan) serta basis eksternal (memperkuat hubungan dan dukungan pihak luar). Hasil identifikasi kebutuhan penguatan peran KPM menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman pengurus tentang peran advokasi dan informasi pendidikan anak serta melakukan aksi advokasi dan informasi tersebut. Refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus KPM terhadap peran advokasi dan mampu merealisasikan peran tersebut dengan baik, seperti melakukan *lobby* ke yayasan IABRI, sosialisasi kegiatan dan kampanye, kerjasama dengan media massa serta *hearing* dengan DPRD Kota Bandung.

Kata kunci: penguatan peran, advokasi dan informasi, komite pendidikan masyarakat

Pendahuluan

Indonesia termasuk Negara berkembang dengan tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih sangat rendah. Data yang dirilis *United Nations Development Programme* (UNDP) terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2011, Indonesia berada di peringkat 124 dari 187 negara. IPM mengukur indeks pembangunan manusia suatu Negara berdasarkan tiga dimensi dasar, yakni taraf pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli. Dari ketiga dimensi tersebut, kontribusi sektor pendidikan adalah yang tertinggi. (<http://www.umm.ac.id>)¹

Berdasarkan pengukuran IPM tersebut, taraf pendidikan yang memberikan sumbangan besar, dinilai sangat rendah. Salah satu faktor yang menjadi tolak ukur rendahnya taraf pendidikan di Indonesia adalah tingginya angka putus sekolah anak usia sekolah. Berdasarkan catatan *kompas.com*², dilaporkan bahwa penurunan peringkat Indonesia dalam Indeks Pembangunan Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) tahun 2011, salah satunya disebabkan tingginya angka putus sekolah di jenjang sekolah dasar, yakni sebanyak 527.850 anak atau 1,7 persen dari 31,05 juta anak SD putus sekolah setiap tahunnya.

Zastrow (1982:151), mengemukakan permasalahan putus sekolah termasuk ke dalam salah satu jenis keterlantaran anak. Dikatakan bahwa jenis keterlantaran salah satunya adalah *failure to attend school regularly* (kegagalan dalam mengikuti sekolah/putus sekolah). Pandangan tersebut dapat dipahami bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya (UU No.23 Tahun 2002, pasal 9). Karena itu, ketika seorang anak tidak dapat

memperoleh haknya (sekolah) maka hal itu dapat dikatakan sebagai salah satu penelantaran anak.

Permasalahan tingginya angka anak putus sekolah, nyatanya tidak saja menjadi fenomena sosial di wilayah pedesaan namun juga banyak terjadi di wilayah perkotaan, tidak terkecuali di Kota Bandung. Kegiatan praktikum yang dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan November 2012 di Kelurahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, menemukan masalah angka anak putus sekolah yang dominan.

Dalam perspektif ekologi, permasalahan anak putus sekolah dapat digambarkan bahwa permasalahan anak sangat berhubungan dengan lingkungan, mulai dari orang tua, keluarga, kelompok bermain anak (*peers group*) dan komunitas serta sistem pendidikan yang ada. Lingkungan dan berbagai isu dan nilai-nilainya, memberikan pengaruh bagi kelangsungan pendidikan anak. Pengaruh yang ditimbulkan dapat bersifat positif atau penguat, namun bisa juga bersifat negatif atau melemahkan. Pengaruh negatif inilah kemudian yang akan menjadi pendorong anak-anak putus sekolah. Komite Pendidikan Masyarakat (KPM) merupakan bagian dari komunitas yang dinilai mampu memberikan pengaruh positif bagi pendidikan anak. Karena itu, KPM menjadi bagian dari pelaksanaan perubahan dan juga pelaksana/agen dari upaya perubahan yang dilakukan bagi pengurangan anak putus sekolah tersebut.

Peran organisasi lokal KPM sangat signifikan bagi upaya-upaya peningkatan akses dan layanan pendidikan di Kelurahan Kebon Jayanti. Selain itu, keberadaan KPM juga cukup strategis sebagai wadah koordinasi lembaga masyarakat lain khususnya di bidang pendidikan anak. Merujuk kepada Edwar dan Husni Thamrin (2006), beberapa peranan organisasi lokal, yakni: (1) peran informasi, (2) peran mediasi, (3) peran advokasi dan (4) peran pemberdayaan.

³.
<http://edukasi.kompas.com/read/2011/06/01/15412949/Apa.Se.betulnya.Prioritas.Kemdiknas>

Penguatan peran advokasi dan informasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini didasari kepada hasil refleksi akhir praktikum. Penguatan peran advokasi KPM dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka, terutama hak bagi kelangsungan pendidikan anak-anak di Kelurahan Kebon Jayanti. Young dan Quinn (2002) dan Suharto (2004) menyebutkan beberapa definisi advokasi, yakni suatu upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai bentuk komunikasi persuasif dan suatu strategi memenangkan argumentasi dan mengubah perilaku

Penguatan peran informasi diarahkan untuk membangun saluran informasi yang lebih komunikatif bagi masyarakat. Wahyono (2004), mengemukakan Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. Pelaksanaan peran informasi KPM yang dilakukan penguatan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dalam pengolahan data sehingga menjadi informasi yang komunikatif bagi masyarakat, terutama keluarga dan anak-anak rentan putus sekolah dan putus sekolah.

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan model yang efektif dalam pelaksanaan penguatan peran organisasi lokal KPM dalam advokasi dan informasi pendidikan anak di Kelurahan Kebon Jayanti. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 1) memperoleh gambaran tentang situasi anak putus sekolah di Kelurahan Kebon Jayanti, 2) mendapatkan gambaran tentang profil organisasi lokal KPM Kelurahan Kebon Jayanti, 3) merumuskan kebutuhan kegiatan untuk penguatan peran organisasi lokal KPM dalam advokasi dan informasi pendidikan anak di Kelurahan Kebon Jayanti, 4) menyusun rencana penguatan peran organisasi lokal KPM dalam advokasi dan informasi

pendidikan anak di Kelurahan Kebon Jayanti, 5) mengimplementasikan rencana penguatan peran organisasi lokal KPM dalam advokasi dan informasi pendidikan anak di Kelurahan Kebon Jayanti, 6) merefleksikan implementasi penguatan peran organisasi lokal KPM dalam advokasi dan informasi pendidikan anak di Kelurahan Kebon Jayanti.

Metode

Penelitian dalam mengembangkan model penguatan peran advokasi dan informasi KPM di Kelurahan Kebon Jayanti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada latar alamiah (*natural setting*) yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek yang diteliti serta bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam (Sugiyono:2008).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan partisipatif (*participatory action research*). Penelitian tindakan partisipatif merupakan bentuk penelitian terapan (*applied research*), yang mencoba untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tertentu dan membantu praktisi dalam memperbaiki tugas-tugasnya (Alston:1998; Neuman:2000).

Secara kontekstual dapat dijelaskan bahwa penelitian ini meneliti fenomena sosial, yakni upaya mengurangi anak putus sekolah melalui penguatan peran organisasi lokal di Kelurahan Kebon Jayanti sebagai hasil refleksi praktikum yang dilakukan sebelumnya. Penelitian tindakan dilakukan dengan memberikan tindakan atau kegiatan intervensi yang bertujuan membantu penyelesaian masalah agar memberikan dampak/manfaat bagi populasi sasaran. Penelitian dilakukan secara sirkuler yang dimulai dari refleksi awal, re-asesmen, penyusunan rencana, implementasi, dan refleksi akhir sehingga dapat menghasilkan model yang sesuai dengan kebutuhan penguatan peran KPM dalam advokasi dan informasi. Penelitian tindakan dilakukan dengan melakukan praktik langsung

bersama partisipan dalam situasi yang alamiah pada KPM Kebon Jayanti.

Informan dalam penelitian ini adalah pengurus organisasi lokal Komite Pendidikan Masyarakat (KPM), tokoh masyarakat dan pemerintah lokal. Penentuan informan dilakukan secara purposif, yaitu pengambilan

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian. Identitas dan karakteristik informan dalam penelitian ini disajikan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, serta jabatannya dalam organisasi atau kelembagaan tertentu, yaitu: (Tabel 1)

Tabel 1
Identitas dan Karakteristik Informan

No	Nama (Inisial)	Usia	L/P	Pend.	Pekerjaan	Jabatan organisasi
1	BS	54	L	Sarjana	PNS	Lurah Kebon Jayanti
2	AZ	57	L	Sarjana	Pensiunan	Ketua RW 12
3	TB	44	L	Sarjana	Swasta	Penasehat KPM
4	DN	58	L	Sarjana	Pensiunan	Ketua LPM Kebon Jayanti
5	NS	40	L	Sarjana	Swasta	Ketua KPM
6	DK	35	L	SMA	Dagang	Sekretaris KPM
7	DH	46	L	SMA	Dagang	Bendahara KPM
8	IK	42	P	SMA	Wartawan	Ketua RT 12
9	YS	46	L	SMP	Kader PKK	Anggota Bidang Pendidikan
10	KN	33	L	Sarjana	Pensiunan	Ketua Forum RW
11	LS	37	P	SMA	Kader PKK	Anggota Bidang Tataboga KPM
12	ES	38	P	SMA	Kader PKK	Ketua Bidang Pendataan KPM
13	TF	46	P	Sarjana	Guru	Ketua Bidang pendidikan KPM

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Observasi Partisipatif, yakni melakukan pengamatan dengan berperan serta dan melakukan kegiatan bersama partisipan secara aktif terutama terkait dengan upaya penguatan peran KPM dalam advokasi dan informasi pendidikan anak di Kelurahan Kebon Jayanti. (2) Wawancara Mendalam, yakni mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan verbal sesuai fokus penelitian penguatan peran advokasi dan informasi pendidikan anak KPM. (3) Studi Dokumentasi, yakni teknik yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder. (4) Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pengurus dan anggota KPM serta *stakeholders* di Kelurahan Kebon Jayanti.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan mengacu pendapat Sugiyono (2008: 270),

antara lain, *pertama*: Uji Kredibilitas, yakni pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukandengan cara: (1) Perpanjangan keikutsertaan dilakukan mulai dari kegiatan praktikum pada bulan Agustus hingga November 2012 dan dilanjutkan dengan penelitian dari bulan Maret hingga Mei 2013. (2) Ketekunan pengamatan dilakukan dengan observasi partisipatif untuk mampu memotret hal-hal penting pada latar penelitian, (3) Triangulasi dilakukan untuk pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu serta menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda. Triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. *Kedua*, uji dependabilitas dilakukan dengan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini, dependabilitas dilakukan oleh auditor independen, yaitu dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam proses penelitian.

Untuk teknik analisis data menggunakan model Miles dan Hibeman (1984) dalam Sugiyono (2008:246), yakni: 1) Reduksi data (*data reduction*). 2) Penyajian data (*data display*), 3) Penarikankesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kelurahan Kebon Jayanti

Kebon Jayanti adalah salah satu kelurahan di wilayah administratif Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Kelurahan Kebon Jayanti terletak di tengah Kota Bandung dan merupakan kawasan padat penduduk yang berada berdampingan dengan stasiun dan Pasar Kiaracondong.



Foto 1

Wilayah Kelurahan Kebon Jayanti (dok. peneliti)

Luas wilayah Kelurahan Kebon Jayanti adalah 27,5 Ha, dengan peruntukan lahan; 22 Ha (80%) untuk pemukiman dan pekarangan, sisanya 5,5 Ha (20%) untuk bangunan lain (prasarana dan fasilitas umum). Peruntukan lahan ini menunjukkan kepadatan wilayah yang cukup tinggi di Kelurahan Kebon Jayanti (80% untuk pemukiman), sedangkan untuk fasilitas umum hanya sekitar 20%.

Jumlah penduduk Kelurahan Kebon Jayanti berdasarkan data potensi hasil pendataan pada bulan Januari 2012 adalah 11.427 jiwa dan 4.500 KK, dengan rincian: jumlah laki-laki 5.763 jiwa dan jumlah perempuan 5.664 jiwa.

Masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti mayoritas penduduk asli (suku Sunda) sekitar 80% dan beragama Islam, sehingga nilai-nilai keagamaan dan budaya Sunda masih cukup kuat di lingkungan masyarakat. Salah satunya ditandai dengan eksistensi beberapa kelompok kesenian Sunda yang masih tetap dipertahankan.

Gambaran Situasi Anak Putus Sekolah di Kelurahan Kebon Jayanti

Gambaran situasi anak di Kelurahan Kebon Jayanti tidak terlepas dari situasi lingkungan tempat tinggal mereka. Kelurahan Kebon Jayanti merupakan kawasan padat penduduk dengan mobilitas yang cukup tinggi. Keberadaan pasar dan stasiun Kiaracondong secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh signifikan terhadap tumbuh kembang anak. Anak-anak banyak diantaranya yang ikut bekerja membantu orang tua berjualan di pasar dan stasiun. Anak-anak terlibat dengan kehidupan pasar dengan segala dinamikanya sehingga banyak diantaranya putus sekolah.

Berdasarkan kondisi tersebut, anak dipandang sebagai alat produksi keluarga. Fenomena tersebut sudah berlangsung lama sehingga menjadikannya sesuatu yang lumrah dan menjadi nilai di keluarga. Karena telah menjadi hal yang biasa maka terjadi pembiaran dan masyarakat yang lain menjadi tidak peduli.

Berdasarkan asesmen yang dilakukan pada salah satu RW (RW 12), ditemukan 20 orang anak yang putus sekolah dari berbagai tingkatan dan jenjang sekolah, yakni di tingkat SD, dan SMP. Sementara angka putus sekolah terbesar berada pada tingkatan SMP atau pada usia-usia remaja pada anak. Temuan ini merupakan gambaran anak putus sekolah di Kelurahan Kebon Jayanti yang sangat tinggi, dan jumlah ini baru sementara di tingkat RW. Jika dibulatkan secara kasar sekitar 20 anak putus sekolah di tiap RW, maka dari 14 RW, ada sekitar 280 anak putus sekolah di Kelurahan Kebon Jayanti.

Hasil analisis masalah anak putus sekolah di RW 12 Kelurahan Kebon Jayanti menunjukkan bahwa penyebab anak-anak ini berhenti sekolah sangatlah beragam. Berdasarkan analisis masalah secara partisipatif diidentifikasi beberapa faktor penyebab anak-anak putus sekolah di Kelurahan Kebon Jayanti, yakni: 1) faktor nilai-nilai pendidikan bagi anak dan orangtua, 2) Faktor lingkungan, 3) Faktor kemiskinan.

Profil Komite Pendidikan Masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti

Komite Pendidikan Masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti merupakan organisasi lokal yang dibentuk pada tanggal 25 Mei 2012 di Aula Rukun Warga 12 melalui musyawarah sejumlah unsur tokoh masyarakat, karang taruna, pekerja sosial masyarakat, dan para kader PKK Kelurahan melalui fasilitasi LSM IABRI.

Sesuai tujuan pembentukannya, organisasi lokal ini dinamakan komite karena merupakan sebuah perkumpulan yang merupakan perwakilan/utusan unsur masyarakat setempat. Karena itu, keanggotaan KPM adalah representasi atau perwakilan dari setiap Rukun Warga (RW). Maka di KPM, setiap RW memiliki perwakilannya di KPM.

Organisasi lokal yang konsen dan peduli pada anak rentan putus sekolah ini telah disahkan oleh Lurah Kebon Jayanti melalui Surat Keputusan Nomor 106/SK/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Susunan pengurus Komite Pendidikan Masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiaracondong. KPM didirikan bertujuan untuk mawadahi usaha-usaha pencegahan dan penanganan anak putus sekolah di Kelurahan Kebon Jayanti.

Kebutuhan Penguatan Peran KPM *Re-asesmen Kebutuhan dan Re-konseptualisasi Peran*

Kegiatan re-asesmen kebutuhan dan re-konseptualisasi peran KPM dilakukan secara partisipatif melalui pertemuan dengan para pengurus KPM dan tokoh masyarakat di Kelurahan Kebon Jayanti pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2013, bertempat di Kantor

Kelurahan Kebon Jayanti. Pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua KPM, Nono Suranto beserta pengurus, Ketua Forum RW Kebon Jayanti, Syaukani, dan tokoh masyarakat Tubagus Doni dan Abdul Aziz.

Dalam proses mengidentifikasi (re-asesmen) kebutuhan tersebut, peneliti terlebih dahulu mengeksplorasi pemahaman pengurus tentang peran dan pelaksanaan peran tersebut oleh KPM. Pada diskusi tersebut, peneliti mengawali dengan menanyakan; apa definisi peran menurut Bapak/Ibu?

Kemudian peneliti bersama-sama peserta merumuskan dan menyepakati (re-konseptualisasi peran) bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku/kegiatan/tugas-tugas dan segala aktifitas yang harus/dapat dilakukan KPM berdasarkan status dan posisinya dalam masyarakat/organisasi.

Perumusan Prioritas Kebutuhan

Hasil rumusan prioritas kebutuhan penguatan peran bagi KPM adalah: 1) Penguatan Peran Advokasi. Penguatan peran advokasi dinilai penting dan prioritas mengingat banyaknya temuan serta kasus-kasus putus sekolah yang memerlukan advokasi dari KPM, misalnya terhadap angka putus sekolah yang sangat tinggi, namun dinilai adanya pembiaran dan sampainya program-program pembangunan pendidikan ke masyarakat bawah, baik dari pemerintah kelurahan maupun ditingkat Pemerintah Kota Bandung serta upaya penyadaran akan hak dan nilai-nilai pendidikan. 2) Penguatan Peran Informasi. Persoalan rendahnya nilai-nilai pendidikan anak dan kesadaran akan hak pendidikan anak tidak terlepas dari minimnya informasi dan pemahaman terkait pentingnya pendidikan bagi anak dan pengetahuan bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak. Demikian pula dengan banyaknya program-program pendidikan yang tidak terinformasi kepada masyarakat. Upaya penguatan peran informasi bagi KPM menjadi penting sebagai corong informasi warga dalam bidang pendidikan anak. KPM dapat berperan sebagai pusat

informasi dan komunikasi pendidikan anak di Kelurahan Kebon Jayanti.

Rencana Tindak Penguatan Peran KPM

Penyusunan rencana tindak dilakukan secara partisipatif melalui pertemuan pengurus KPM dan tokoh masyarakat, seperti ketua RW, ketua LPM dan forum RW, dengan menggunakan teknik ToP (*Technology of Participation*). Berdasarkan diskusi pada pertemuan tersebut dapat dirumuskan rencana tindak kegiatan penguatan peran advokasi dan informasi KPM, sebagai berikut:

Nama Kegiatan

“Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Peran Komite Pendidikan Masyarakat (KPM) dalam Advokasi dan informasi pendidikan Anak di Kelurahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung”.

Tujuan Kegiatan

Tujuan umum yang ingin dicapai dari kegiatan pelatihan ini adalah optimalisasi peran KPM dalam meningkatkan pemahaman pengurus KPM dalam pelaksanaan peran advokasi pendidikan anak di masyarakat. Tujuan khusus dari kegiatan pelatihan adalah: a) Meningkatkan pemahaman akan peran advokasi bagi pengurus KPM dalam upaya penanganan putus sekolah di Kelurahan Kebon Jayanti, b) Pengurus KPM memahami akan pentingnya advokasi, memahami strategi dan taktik, langkah-langkah advokasi dan mampu merencanakan serta melaksanakan advokasi. c) Meningkatkan kapasitas komunikasi eksternal (lobi dan negosiasi) terhadap sumber-sumber, baik internal maupun eksternal. d) Memperkuat daya dorong KPM terhadap program-program pemerintah agar dapat memihak kepada upaya penanganan masalah pendidikan anak di Kelurahan Kebon Jayanti.



Foto 2

Kegiatan Penguatan Kapasitas

Bentuk dan Sasaran Kegiatan

Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pendidikan dan latihan (pelatihan) orang dewasa yang menekankan pada diskusi, simulasi dan praktek serta menjadikan peserta sebagai subjek pelatihan. Sasaran dari kegiatan pelatihan ini adalah seluruh pengurus KPM. Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama satu hari, pada tanggal 4 Mei 2013, bertempat di Aula Kantor Kelurahan Kebon Jayanti Jalan Terusan KA Lama Kiaracondong.

Rincian dan Jadwal Kegiatan Pelatihan

Tabel 2
Jadwal Kegiatan Pelatihan

Waktu	Acara/Materi	Narasumber
07.00-08.00	Persiapan	
08.00-09.30	Materi Diskusi Sesi I - Apa dan mengapa advokasi - Bagan Struktur Analisis advokasi - Segitiga koordinasi advokasi - memahami lingkaran inti pengemasan informasi untuk advokasi - Langkah-langkah advokasi - 198 cara mendesakkan perubahan - Evaluasi advokasi	a. Alvin Hidayat dari Mata Limbah (fasilitator) b. Hendrianto (peneliti) sebagai co-fasilitator
09.30-10.00	Istirahat	
10.00-12.00	Materi Diskusi Sesi II Menyusun dan merumuskan aksi advokasi	a. Hendrianto (peneliti) b. Untung (co-fasilitator)
12.00-13.00	Istirahat	
13.00-14.00	Evaluasi dan Refleksi	Peneliti dan Pengurus KPM

Analisis Kelayakan Program.

Analisis terhadap kelayakan program/kegiatan dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Analisis SWOT Rencana Kegiatan KPM Tahun 2013

Eksternal Internal	Peluang	Tantangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada tenaga sumber dari STKS beserta rekan-rekan yang lain. ▪ Adanya dukungan dari pemerintah lokal, baik dari lurah hingga RW, dan lembaga donor (<i>save the children</i> dan IABRI)
Kekuatan	Strategi:	Strategi:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motivasi yang tinggi dari pengurus KPM untuk belajar dan menambah pengetahuan. ▪ Kohesivitas atau kekompakan pengurus KPM yang cukup tinggi. ▪ Terdapat beberapa pengurus yang aktif di partai politik sehingga memiliki akses ke lembaga legislatif. ▪ Ada pengurus yang berprofesi sebagai wartawan sehingga memiliki jejaring ke sejumlah media massa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan seluruh pengurus untuk memperoleh dukungan dan partisipasi anggota. ▪ Melakukan lobby dan kerjasama dengan media ▪ Melakukan lobby kepada DPRD Kota Bandung ▪ Meningkatkan kerjasama melalui koordinasi dan konsolidasi kepada STKS, pemerintah kelurahan, forum RW serta menyusun proposal ke lembaga donor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat kohesivitas KPM sehingga tidak terpengaruh dengan adanya perbedaan pendapat di tingkat kepemimpinan lokal ▪ Jika memungkinkan dapat melakukan mediasi antara pihak-pihak yang berseberangan ▪ Berusaha netral dalam setiap kegiatan KPM
Kelemahan	Strategi:	Strategi:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyak diantara anggota KPM yang aktif di organisasi lokal lain ▪ Kesibukan pengurus KPM pada bulan politik di Kota Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan penentuan jadwal dan pembagian tugas masing2 ▪ Memperkuat dukungan dari pemerintah lokal melalui fasilitasi KPM pada pilkada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat silaturahmi diantara pengurus/ anggota dengan seluruh elemen/ unsur masy. Terutama tokoh2 berseberangan.

Sumber: Hasil Diskusi Bersama Pengurus KPM

Berdasarkan analisis SWOT yaitu *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Treats* (tantangan) yang dilakukan, maka dapat digambarkan bahwa pada internal, KPM memiliki beberapa kekuatan yang dapat dioptimalkan guna meningkatkan efektifitas capaian/menentukan kelayakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kekuatan KPM itu dapat terlihat dari; (1) motivasi yang tinggi dari pengurus untuk berkembang dan untuk membesarkan KPM, (2) kuatnya kohesivitas dan kekompakan pengurus juga menjadi penguat bagi stabilitas dan partisipasi aktif anggota, (3) keaktifan dalam beberapa organisasi partai politik yang memungkinkan akses kepada lembaga legislatif Kota Bandung, dan adanya pengurus yang berprofesi sebagai wartawan untuk

memudahkan kerjasama dengan media massa. Sementara untuk kelemahan di internal, teridentifikasi pada kesibukan pengurus di beberapa organisasi lokal berbeda dan keterlibatan dalam pemilu/pilkada Kota Bandung.

Pada aspek eksternal, juga dapat teridentifikasi peluang dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan, yakni adanya dukungan dari STKS/mahasiswa, pemerintah lokal dan lembaga donor, sementara tantangan yang dihadapi adalah konflik horizontal di masyarakat. Selanjutnya, sesuai tabel 9 tersebut juga dirumuskan strategi-strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang, serta strategi dalam meminimalisir kelemahan dan tantangan.

Implementasi Model

Implementasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan perencanaan. Adapun gambaran implementasi pelaksanaan model tersebut adalah sebagai berikut:

Konsolidasi dan Koordinasi Kegiatan

Implementasi model diawali dengan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait/pemangku kepentingan di Kelurahan Kebon Jayanti. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan hasil rumusan rencana tindak guna memperoleh dukungan, kerjasama dan kesepahaman bersama tentang rencana implementasi kegiatan penguatan peran KPM yang akan dilakukan. Peneliti bersama tim kerja melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemerintah lokal, mulai dari Pemerintah Kelurahan Kebon Jayanti hingga para ketua RW, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan, seperti narasumber kegiatan, tempat kegiatan dan kebutuhan peralatannya.

Pelatihan Advokasi dan Informasi

Pelatihan advokasi dan informasi merupakan bagian dari penguatan kapasitas KPM. Pelatihan diawali dengan menyusun tata tertib dan menyepakati waktu pelatihan serta mengungkap harapan-harapan peserta terhadap pelatihan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan identifikasi harapan-harapan dengan cara membagikan kertas *meta plan* dan peserta diminta untuk menuliskan harapannya. Berdasarkan katego-risasi jawaban peserta, dapat digambarkan bahwa peserta berharap untuk mampu: (1) menambah pengetahuan tentang advokasi, (2) melakukan teknik-teknik advokasi, (3) membuat proposal advokasi, (4) melakukan pembelaan terhadap anak putus sekolah, dan (5) mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain.

Berikutnya dilanjutkan dengan materi advokasi oleh Alvin Hidayat, seorang praktisi pemberdayaan masyarakat yang juga rekan peneliti di STKS sebagai fasilitator utama dan

peneliti sebagai co-fasilitator. Sesuai dengan konsep awal pelatihan, bahwa pelatihan dirancang untuk membangun kerangka kegiatan advokasi bagi KPM melalui inisiatif dan menggali kekuatan lokal, maka proses pelatihan didominasi dengan diskusi dan simulasi serta pembahasan kasus.



Foto 2
Pelatihan KPM melalui Diskusi

Lanjutan materi kedua dilanjutkan dengan menyusun dan merumuskan rencana aksi advokasi KPM. Perumusan rencana advokasi KPM merupakan *follow up* dari kegiatan pelatihan guna mempraktekkan materi pelatihan ke dalam kegiatan yang nyata. Pelaksanaan penyusunan rencana aksi ini difasilitasi oleh peneliti dengan bersama-sama peserta merumuskan isu/masalah, pelaku yang terlibat, kegiatan advokasinya dan tujuan dari advokasi tersebut. Berdasarkan diskusi dan pembahasan dengan peserta, dapat digambarkan hasil diskusi sebagai berikut:

Tabel 4
Rumusan Rencana Advokasi KPM

Isu/masalah	Pelaku	Kegiatan	Tujuan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angka DO yang tinggi ▪ Minimnya kesadaran hak ▪ Motivasi bersekolah yang rendah ▪ Kurangnya kepedulian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anak rentan DO dan anak DO ▪ KPM ▪ Pemerintah lokal ▪ Organisasi lokal lain ▪ Tokoh masyarakat dan tokoh agama ▪ Yayasan IABRI ▪ Pers 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Validasi data DO ▪ Visualisasi data ▪ Menggalang dukungan kampanye pendidikan ▪ KPM sebagai sentra informasi ▪ Melakukan <i>lobby</i> kepada pemerintah lokal dan IABRI ▪ Melakukan <i>hearing</i> dengan DPRD ▪ Bekerjasama dengan pers 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sadar akan pentingnya pendidikan dan pendidikan sebagai hak setiap anak ▪ Memberikan laporan atas temuan kasus anak DO supaya menjadi pembahasan di DPRD/Dinas terkait. ▪ Terpublikasinya temuan dan sosialisasi KPM

Sumber Data: Hasil Diskusi Pelatihan Penguatan Peran Advokasi bagi KPM, 4 Mei 2013

Hasil rumusan rencana aksi advokasi KPM yang dirumuskan bersama menjadi agenda kerja sekaligus program kerja KPM ke depan. Supaya rencana aksi advokasi ini menjadi lebih operasional, kemudian dijabarkan dengan penentuan jadwal dan penanggung jawab atau koordinator dari masing-masing kegiatan. Kegiatan pelatihan penguatan peran KPM dalam advokasi pendidikan anak di Kelurahan Kebon Jayanti ditutup dengan komitmen setiap pengurus dan anggota untuk mensukseskan rencana aksi, jadwal kegiatan dan koordinator masing-masing kegiatan.

Praktek Advokasi dan Informasi

Berdasarkan rencana aksi advokasi yang dirumuskan bersama pada kegiatan pelatihan advokasi KPM, telah dilakukan beberapa praktek pelaksanaan peran advokasi oleh KPM, yaitu: a) Melakukan *lobby* ke Yayasan

IABRI. Guna mendapatkan kantor/sekretariat yang representatif bagi KPM, dilakukan lobi ke Bapak Edi Nuryakin, Pimpinan Yayasan IABRI untuk memperoleh dukungan dan bantuannya untuk merealisasikan kantor/sekretariat sendiri bagi KPM. Pilihan kepada Yayasan IABRI didasari bahwa lahirnya KPM merupakan bentukan dan fasilitasi IABRI.

Selain itu, berdasarkan analisis pemangku kepentingan (*stakeholders analisis*) yang dilakukan, Yayasan IABRI dinilai memiliki sumber daya untuk itu. Karena itu, KPM mencoba melakukan lobi untuk memperoleh pinjaman/ dana talangan untuk penyewaan kantor/sekretariat. Lobby ini berhasil dilakukan dan dapat menyewa rumah di jalan Kebon Jayanti No. 65 sebagai kantor KPM, b) Membuat pusat data dan informasi KPM. Setelah memiliki kantor/sekretariat sendiri, KPM mulai menyusun data dan informasi KPM, diantaranya profil kelurahan, profil KPM, foto-foto kegiatan dan data-data pendidikan anak, meliputi data-data anak rentan putus sekolah, data anak putus sekolah, informasi sekolah kesetaraan paket A, B, dan C. Meskipun data-data dan informasi tersebut masih belum menyeluruh, namun setidaknya ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya kegiatan serta KPM sudah mulai ada peran informasi dan advokasi yang dilakukan, c) Kampanye dan sosialisasi kegiatan KPM. Setelah KPM memiliki kantor/ sekretariat sendiri dan telah terangkumnya data-data/informasi kegiatan serta temuan lapangan, KPM mulai mengkampanyekan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah kelurahan bahwa kantor KPM di Jalan Kebon Jayanti No. 65 adalah pusat data dan informasi pendidikan di Kelurahan Kebon Jayanti. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan saran ke kantor KPM yang dibuka setiap hari, d) Bekerja sama dengan media massa. Upaya publikasi ke media massa dilakukan oleh salah seorang pengurus KPM yang juga berprofesi sebagai wartawan, sehingga mereka juga telah memiliki jejering kepada beberapa media lokal bahkan nasional. Saat ini baru satu media yang mengangkat

laporan khusus (lapsus) tentang kegiatan KPM yakni Koran Dwi Mingguan KPK (Koran Penelusuran Kasus) pada edisi ke-75 halaman 12, yang memuat “Ketua KPM menyerahkan Piagam penghargaan kepada Kapolsek Kiaracondong”. Saat ini juga sedang disusun *press release* KPM dan menjajaki beberapa media lokal di Bandung untuk dapat bekerja sama membantu mempublikasikan permasalahan pendidikan anak di Kelurahan Kebon Jayanti, e) Sosialisasi kegiatan sekaligus *hearing* dengan DPRD Kota Bandung. Sebagai bentuk upaya KPM memperoleh dukungan sekaligus melakukan advokasi terhadap beberapa temuan permasalahan anak putus sekolah di Kelurahan Kebon Jayanti, KPM juga melakukan sosialisasi kegiatan sekaligus *hearing* bersama pemangku kepentingan dengan menghadirkan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Drs. H. Asep Dedi Ruyadi, SH. M.Si dan Dinas Sosial Kota Bandung yang diwakili oleh Kabid Kerawanan Sosial, Hj. Ecih, SH. Kegiatan yang juga dihadiri Lurah Kebon Jayanti, Budi Sutedja, S.IKOM ini dilaksanakan pada tanggal Mei 2013 di Aula Kantor Kelurahan Kebon Jayanti.

Refleksi Model

Pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas penguatan peran KPM dalam advokasi dan informasi pendidikan anak melalui pelatihan dan pendampingan terhadap pelaksanaan praktek-praktek advokasi memperlihatkan adanya kemajuan dalam aktualisasi peran KPM. Hal itu dapat dilihat dari mulai adanya pengorganisasian terhadap implementasi peran KPM dalam mendorong kesadaran kritis pengurus melihat fenomena masalah pendidikan anak menjadi tanggung jawab moril untuk membantu menyelesaikan masalahnya.

Beberapa praktik peran advokasi yang sudah mulai dilakukan KPM, membuktikan bahwa kerangka pengetahuan dan keterampilan menjadi unsur penting dalam melakukan suatu perubahan. Motivasi dan semangat yang kuat saja tidak cukup mumpuni dalam mewujudkan

upaya perubahan jika tanpa dilandasi kerangka pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Sebagai organisasi lokal yang tumbuh dan bekerja di aras lokal, maka nilai-nilai lokal (*local wisdom*), seperti kebiasaan lokal, kebudayaan lokal, sumber daya lokal, dan proses lokal. Konsep lokalitas menjadi penting untuk dicermati karena dinilai cukup berpengaruh terhadap nilai-nilai yang tumbuh dan dianut dalam organisasi. Karena itu, dengan memahami nilai-nilai lokal tersebut maka akan dapat dipetakan kekuatan ataupun kelemahan dalam melaksanakan penguatan kapasitas.

Implikasi Praktis Hasil Penelitian

Implikasi praktis merupakan proses penelitian sebagai praktek pekerjaan sosial, dapat dijadikan pembelajaran bagi praktek pekerjaan sosial berikutnya. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat peta sosial anak putus sekolah di Kelurahan Kebon Jayanti. Proses dan hasil penelitian tindakan terhadap fenomena permasalahan anak putus sekolah di Kelurahan Kebon Jayanti, juga telah melahirkan peta sosial anak putus sekolah. Peta sosial anak putus sekolah yang dimaksud adalah meliputi situasi dan kondisi anak putus sekolah, sebaran dan populasi anak putus sekolah, penyebab dan dampak anak putus sekolah. Data dan fakta ini penting dalam pengembangan program bagi pendidikan anak serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan terhadap persoalan anak putus sekolah di Kelurahan Kebon Jayanti.
2. Melahirkan aksi advokasi dan informasi KPM. Keluaran dari kegiatan penguatan kapasitas adalah secara partisipatif dapat disusun rencana aksi advokasi dan informasi KPM. Adapun hasil rumusan rencana aksi tersebut diaplikasikan dalam beberapa kegiatan, yakni melakukan lobi ke pimpinan Yayasan IABRI, menyusun

pusat data/informasi pendidikan KPM, kerjasama dengan media, melakukan promosi dan mengkampanyekan KPM sebagai pusat data dan informasi KPM, menyusun media kampanye informasi seperti spanduk, kalender dan *leaflet* serta melakukan sosialisasi kegiatan KPM sekaligus hearing dengan DPRD Kota Bandung.

Implikasi Teoritis Hasil Penelitian

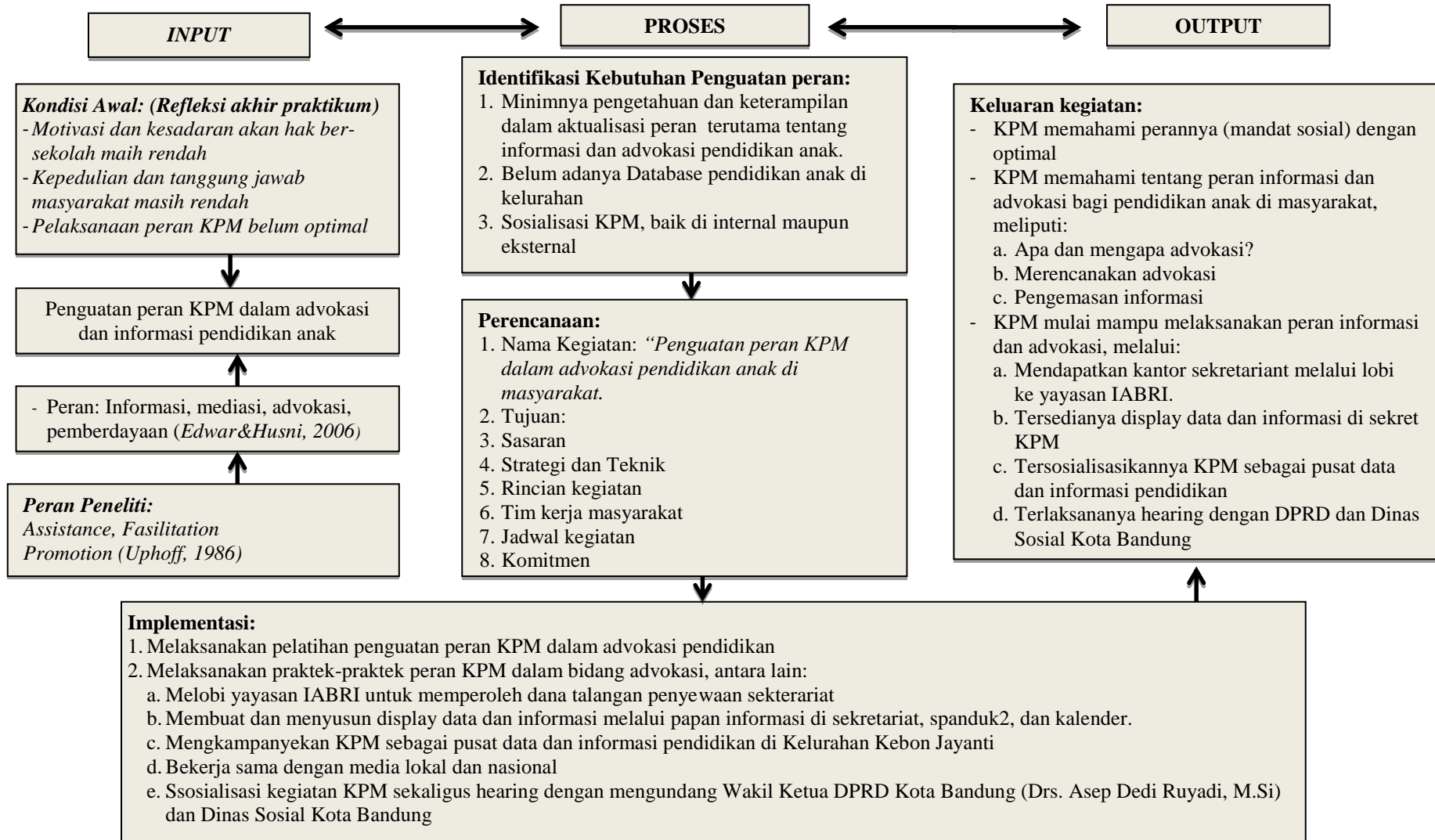
Penelitian tindakan partisipatif yang dilakukan berimplikasi terhadap pengembangan teori-teori pekerjaan sosial, yakni:

1. Implikasi berkenaan dengan organisasi local. Upaya pengembangan organisasi lokal sebagai bagian dari perubahan berencana di masyarakat dipandang strategis karena organisasi merupakan wadah manusia melakukan kegiatan dan memenuhi kebutuhan. Talcot parsons (1960), dalam (Suharto:2006) menyatakan bahwa perkembangan organisasi merupakan mekanisme penting pada masyarakat yang terdiferensiasi, karena kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi secara individu, menjadi dapat dicapai berkat adanya organisasi. Amitai Etzioni (1964), menyatakan bahwa munculnya struktur sosial yang 'terorganisasi' telah

memungkinkan masyarakat modern berjalan dengan baik. Keberadaan Komite Pendidikan Masyarakat (KPM) sebagai salah satu organisasi lokal di Kelurahan Kebon Jayanti merupakan sarana atau wadah bagi warga dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan di komunitas.

2. Implikasi berkenaan dengan penguatan kapasitas. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan penguatan terhadap peran KPM sehingga mampu melaksanakan perannya dengan optimal, dan pada akhirnya akan memberikan dampak signifikan terhadap penerima layanan dari kegiatan KPM, terutama anak putus sekolah. Proses penguatan peran organisasi lokal KPM dilakukan melalui penguatan kapasitas (*capacity building*) pengurus KPM dalam advokasi dan informasi. Fokus terhadap penguatan peran advokasi didasarkan kepada kebutuhan dari pengurus, rumusan masalah dan temuan-temuan/kasus pendidikan anak di Kelurahan Kebon Jayanti.

Gambaran terhadap implikasi hasil penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1
Model Akhir Penguatan Peran Komite Pendidikan Masyarakat (KPM) dalam Advokasi dan Informasi Pendidikan Anak di Kelurahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung

Simpulan

Secara umum penelitian ini telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu mengembangkan sebuah model penguatan peran KPM dalam advokasi dan informasi pendidikan anak di Kelurahan Kebon Jayanti. Model ini dikembangkan berdasarkan pertimbangan bahwa organisasi lokal KPM memiliki potensi untuk maju dan berkembang melalui penguatan basis internal dan basis eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model awal masih perlu dikembangkan, terutama dalam memperkuat basis internal (pengetahuan dan keterampilan) serta basis eksternal (memperkuat hubungan dan dukungan pihak luar). Hasil identifikasi kebutuhan penguatan peran KPM dalam advokasi dan informasi pendidikan anak menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman pengurus tentang peran advokasi dan informasi pendidikan anak serta melakukan aksi advokasi tersebut. Implementasi model dilakukan dengan pendekatan penguatan kapasitas dalam rangka peningkatan pemahaman pengurus dalam advokasi dan informasi pendidikan anak melalui pelatihan (pendidikan dan latihan) dan pendampingan dalam melakukan praktik-praktik advokasi dan informasi.

Berdasarkan refleksi akhir terhadap pelaksanaan model, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus KPM terhadap peran advokasi dan informasi serta mampu merealisasikan peran tersebut dengan baik, seperti melakukan *lobby* ke yayasan IABRI, sosialisasi kegiatan dan kampanye, kerjasama dengan media massa serta *hearing* dengan DPRD Kota Bandung. Dari hasil refleksi diketahui bahwa meskipun telah ada peningkatan peran dari KPM, namun demikian, sebagai sebuah proses intervensi terukur yang dilakukan, penguatan peran advokasi dan informasi bagi KPM Kelurahan Kebon Jayanti dibatasi oleh waktu penelitian sehingga perlu dilakukan pengembangan kelembagaan KPM, seperti penajaman visi dan misi, serta program kerja KPM ke depan, perluasan dukungan dan peningkatan kemampuan komunikasi efektif dan persuasif dari pengurus dalam menunjang kegiatan

advokasi selanjutnya. Guna penyempurnaan model yang telah dilakukan, peneliti menilai perlu rujukan kepada pihak-pihak terkait agar kegiatan dan program KPM dapat lebih terarah dan dilaksanakn secara terus menerus. Peneliti berharap, kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat menerima mandat tersebut sehingga KPM dapat tumbuh, berkembang dan menjadi organisasi yang mapan dan mandiri.

Saran

Bagi Peneliti Lanjutan

Bagi peneliti lanjutan direkomendasikan untuk melakukan penguatan terhadap basis internal KPM, meliputi: bidang kelembagaan, seperti penajaman visi dan misi organisasi, perumusan AD/ART, penyusunan program kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan basis eksternal, yakni perlu ada inventarisasi dukungan terhadap KPM, sehingga dapat terpetakan pihak-pihak pendukung dan penghambat kegiatan. Berikutnya adalah peningkatan kemampuan komunikasi efektif dan persuasif dari pengurus perlu ditingkatkan mengingat kemampuan dan keterampilan komunikasi yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam setiap aktifitas KPM.

Bagi Komite Pendidikan Masyarakat (KPM)

Bagi KPM direkoemendasikan untuk menjalin kemitraan/ kerjasama dengan organisasi lokal yang ada, seperti KPM, PKK, TSKS dan Karang Taruna serta organisasi masyarakat lainnya melalui pertemuan berkala untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas program. Melakukan studi banding ke organisasi lain yang sejenis untuk mendapatkan informasi baru terkait pelaksanaan kegiatan KPM. Peneliti juga merekomendasikan agar memperoleh legalitas hukum (berbadan hukum), sehingga mampu meningkatkan posisi tawar dan kepercayaan dari lembaga-lembaga donor yang lain dalam memberikan program/ *project* bagi KPM.

Bagi Pemerintah

Pemerintah Daerah Kota Bandung, mulai dari Pemerintah Kelurahan Kebon Jayanti, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta DPRD

diharapkan dapat memberikan dukungan bagi pengembangan KPM ke depan. Peneliti merekomendasikan perlu ada upaya pengembangan dan pembinaan terhadap organisasi lokal yang ada. Sehingga ada kegiahan organisasi lokal tersebut melalui dukungan dan fasilitasi pemerintah setempat. Upaya itu dapat dilakukan melalui pemberian *reward* terhadap organisasi-organisasi lokal yang dinilai berprestasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya perlu upaya peningkatan kepedulian dan tanggung

jawab masyarakat dalam membantu organisasi lokal guna menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak di lingkungannya, diantaranya melalui pengefektifan forum-forum RW dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam untuk mengawasi anak-anak yang rentan putus sekolah dan mendorong para ketua RW/RT dalam melibatkan warga masyarakat dalam setiap program penanganan anak putus sekolah.

Daftar Pustaka

- Edward, & Husni Thamrin. 2006. Peranan Organisasi Lokal dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas, Volume 5 Nomor 3, halaman 304-323.* FISIP USU.
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* PT.Refika Aditama: Bandung
- _____. 2006. *Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat.* Makalah: Pelatihan Peran Pesantren Darut Tauhid dalam Menangani Kemiskinan di Bandung. Darut Tauhid Bandung, 17 Januari 2006.
- _____. 2006. Pengembangan Masyarakat dalam Praktek Pekerjaan Sosial. *Makalah: Pelatihan Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, FISIP Universitas Jember, 28 September 2006.*
- Netting, F. Ellen, Peter M. Kettner dan Steven L. McMurtry. 1993. *Social Work Macro Practice,* New York: Longman
- Neuman, W.L. 2000. *Social Research Method: Quantitative and Qualitative Approaches, Fourth Edition.* USA Pearson: Education Company
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,* Bandung: Alfabeta.
- Suwarsih Madya. 2011. *Penelitian Tindakan: Teori dan Praktek.* Bandung: Alfabeta.
- Uphoff, N. 1986. *Local Institutional Development: An Analitical Sourcebook with Cases.* Rural Development Committee Cornell University: Cornell, Kumaria Press.